

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dimana didalamnya terdapat berbagai corak keragaman dan keberagaman. Masyarakat didalamnya hidup berkelompok mulai dari lapisan terkecil (keluarga) sampai lapisan terbesar (negara). Mulai dari lapisan paling bawah, setiap orang pada waktunya akan mempunyai keinginan untuk berkeluarga dan membentuk sebuah kelompok baru. Kelompok-kelompok tersebut kemudian bergabung dalam sebuah Rukun Tetangga (RT), kumpulan RT tersebut kemudian bergabung dalam sebuah Rukun Tetangga (RW), dan kumpulan RW tersebut bergabung dalam sebuah dusun, dan kumpulan dari beberapa dusun kemudian bergabung menjadi sebuah desa.

Desa merupakan salah satu bentuk dari kehidupan bersama, tinggal bersama-sama yang semuanya hampir mengenal dan kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perkebunan dan lain-lain. Usaha masyarakat desa masih dipengaruhi oleh kehendak hukum alam. Terdapat banyak ikatan kekeluargaan yang baik dalam masyarakat desa, kekuatan pada tradisi dan

kaidah-kaidah sosial hasil kesepakatan bersama serta keagamaannya pun masih cukup kuat.¹

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama dengan pembantunya merupakan pamong desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu ia juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, tidak bisa menuruti keinginannya sendiri.²

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa kepala desa merupakan pemimpin tingkat desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkup wilayahnya. Pengertian tersebut juga mengisyaratkan bahwa kepala desa memegang peranan penting bagi perkembangan dan kemajuan dari desa tersebut. Dimana bahwa kepala desa yang kompeten di bidangnya, bisa memanfaatkan segala kelebihan dan kekurangan di desa menjadi peluang positif, menggerakkan anggota masyarakat dengan baik dan bisa bersinergi positif antara kepala desa dengan masyarakat maka akan menjadikan desa tersebut menjadi desa yang unggul. Dan akhirnya atas segala prestasi yang diraih tersebut, desa Panggunharjo diberi anugrah menjadi desa budaya oleh pemerintah DIY

¹ Hariadi B. Wijayanti, dkk., *Hukum Tata Negara: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), hlm. 51.

² Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 79.

dengan Surat Keputusan DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya.³

Desa Panggungharjo merupakan satu dari sekian banyak desa yang bisa mewujudkan desa unggul tersebut. secara administratif desa ini memiliki 14 dusun yaitu Garon, Cabeyan, Ngireng-ireng, Geneng, Jaranan, Prancak Glondong, Pandes, Sawit, Pelemsewu, Kweni, Dongkelan, Glugo, Krapyak Kulon, dan Krapyak Wetan.⁴ Desa yang berada di Sewon, Bantul, Yogyakarta tersebut sudah banyak menghasilkan karya positif dan bisa membuktikan menjadi desa unggul. Beberapa hal yang menarik di desa tersebut diantaranya adalah “Kampung Dolanan” di dusun Pandes desa Panggungharjo.⁵ Dimana desa tersebut berada tidak jauh dari Universitas Seni Indonesia (ISI), banyak mahasiswa yang tinggal disana, tidak sedikit masyarakat dan mahasiswa yang membuat dan menjual berbagai jenis mainan tradisional sebagai mata pencaharian mereka.

Disamping itu dusun Pandes juga menjadi salah satu desa binaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMB) Bantul, dengan adanya program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS).⁶ Program tersebut merupakan program pemberdayaan wanita menggunakan pendekatan lintas bidang pembangunan pendidikan dan ekonomi dengan tujuan wanita lebih bisa mandiri dan ikut serta berperan

³ Surat Keputusan DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya.

⁴ Buku Desa Panggungharjo

⁵ Observasi di Desa Panggungharjo, Rabu, 13 September 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Warsiah, ketua Dasawisma Ibu-Ibu dusun Pandes, 13 September 2017.

aktif dalam membantu ekonomi keluarga dengan cara membentuk keluarga sehat sejahtera.

Gambar 1.1

Front Office Kantor Desa Panggungharjo



Sumber: Data Premier 2017

Keberhasilan sebuah desa tidak akan lepas dari peran aktif-kreatif kepala desa yang profesional. Dimana seluruh kegiatan dalam lingkup desa harus diketahui oleh kepala desa. Disitu juga termasuk bagaimana kepala desa memunculkan ide-ide kreatif inovatif untuk merangsang rakyatnya untuk ikut berperan aktif membangun desa. Seperti kepala desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt yang selalu memberikan dorongan semangat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memaksimalkan potensinya. Banyak prestasi yang diraih desa

Panggungharjo selama masa kepemimpinannya, diantaranya adalah desa Panggungharjo menjadi desa terbaik tingkat nasional pada tahun 2014.

Menjadi hal yang menarik bahwa pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya (sebelum tahun 2012) desa tersebut hanya desa biasa dengan aktivitas didalamnya yang biasa juga. Namun setelah Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt mengahankan tiga kandidat lain dan dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2012, beliau bisa merubah desa Panggungharjo menjadi desa yang sangat berkembang hanya dalam rentang waktu dua tahun.

Tidak mudah kiranya menata ulang sebuah desa, dimana harus memahami segala konflik, peluang dan hambatan yang ada di masyarakat. Kemudian juga harus mengetahui peta politik di tingkat desa yang harus dirangkul dan bersatu padu demi kemajuan desa. Disamping itu juga harus mengetahui seberapa jauh kompetensi SDM masyarakat, kertampilan dan potensi yang mendukung dan melemahkan serta mengetahui tantangan dan peluang kedepan nanti.

Namun tidak hayal Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt beserta perangkat dan masyarakat Panggungharjo ternyata bisa mewujudkan itu semua. Berbagai inovasi tersebut juga terus dikembangkan sampai sekarang. Tidak sedikit hasil kreativitas desa yang membanggakan, terbukti

pada tahun 2016 desa Panggungharjo diresmikan sebagai desa budaya oleh pemerintah DIY.⁷

Namun daripada itu berbagai keberhasilan tersebut tidak serta merta hanya keberhasilan seorang kepala desa. Dibalik itu semua adalah dari partisipasi politik masyarakat desa Panggungharjo yang satu visi misi dengan pemerintah desa panggungharjo tersebut. masyarakat desa dengan segala upaya memberikan bentuk partisipasinya untuk kemajuan desa dengan baik, akhirnya terwujud sinergi antara program desa dan masyarakat itu sendiri. Berangkat dari keunikan dan segudang prestasi yang telah diraih desa Panggungharjo ini maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai “Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa Panggungharjo dalam Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Tahun 2012-2017.”

Menjadi penting untuk membahas lebih lanjut mengenai pembahasan yang diangkat penulis karena banyak manfaat yang bisa diambil jika banyak desa yang bisa berkarya dan berinovasi seperti desa Panggungharjo ini. Mulai dari mengatasi perselisihan masyarakat, memberikan solusi, meningkatkan kualitas SDM, menata tata ruang desa, meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur desa, mendirikan ekonomi kreatif, menjalin hubungan dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

⁷ <http://www.panggungharjo.desa.id/prestasi/>, dinduh tanggal Rabu, 20 September 2017, pukul 20.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan dalam latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah dengan mengajukan dua rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana dinamika kepemimpinan kepala desa Panggungharjo dalam membangun partisipasi politik masyarakat masa bakti 2012-2017?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kepemimpinan kepala desa Panggungharjo dalam membangun partisipasi politik masyarakat masa bakti 2012-2017?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dua rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui berbagai dinamika yang terjadi pada masa kepemimpinan kepala desa Panggungharjo dalam membangun partisipasi masyarakat masa bakti 2012-2017
2. Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kepemimpinan kepala desa Panggungharjo dalam membangun partisipasi politik masyarakat masa bakti 2012-2017

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan tentang bagaimana dinamika kepemimpinan kepala desa Panggunharjo dalam membangun partisipasi politik masyarakat masa bakti 2012-2017 beserta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan desa mewujudkan desa budaya tersebut.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi para pembaca khususnya bagi para kepala desa dan para calon kepala desa agar bisa belajar bagaimana dinamika dan implementasi kepemimpinan kepala desa di lapangan. dimana dengan memahami dinamika dan gambaran implementasi di lapangan diharapkan kepala desa bias memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Disamping itu dengan mengetahui berbagai factor pendukung, bisa menjadi modal yang baik untuk dimaksimalkan. Dan dengan mengetahui faktor penghambat, bisa memberikan antisipasi yang tepat dari penghambat tersebut. bahkan tidak khayal faktor penghambat tersebut bisa dijadikan faktor positif yang bermanfaat.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan berbagai upaya penulis telah melakukan telaan pustaka untuk menghindari terjadinya pengulangan pembahasan. Disamping itu juga tinjauan pustaka ini berguna untuk membatasi wilayah penelitian yang

di lakukan oleh penulis. Dari beberapa hasil telaah pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis Istu Amanah Alwiyan,⁸ dengan judul “*Upaya Kampung Dolanan Dusun Pandes Panggunharjo Sewon Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelestarian Mainan Tradisional.*”

Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar dusun Pandes desa Panggunharjo. Permasalahan yang diangkat berupa bagaimana melestarikan mainan tradisional sebagai mainan favorit anak agar tidak tergerus permainan modern yang serba elektronik.

Hasil penelitian tersebut berupa dusun Pandes sebagai “Kampung Dolanan” berusaha meneruskan regenerasi keahlian membuat mainan tradisional kepada generasi muda. Hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat anak kepada permainan tradisional. Untuk mendukung lebih bermanfaatnya keahlian tersebut, hasil mainan tradisional tersebut juga dipasarkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah,⁹ dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peranan Wanita*

⁸ Istu Amanah Alwiyan, “*Upaya Kampung Dolanan Dusun Pandes Panggunharjo Sewon Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelestarian Mainan Tradisional,*” Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

⁹ Uswatun Khasanah, “*Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Studi di Dusun Pandes, Kelurahan Panggunharjo,*

Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Studi di Dusun Pandes, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.”

Penelitian tersebut membahas mengenai masalah usaha mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut berupa program P2W-KSS di dusun Pandes adalah berupa penyuluhan, pelaksanaan dan evaluasi kepada kaum wanita di dusun tersebut. hasilnya adalah keluarga menjadi lebih sejahtera dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan mengurangi pengangguran keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cahya Bintang Yulianto,¹⁰ dengan judul *“Pola Interaksi Sosial antara masyarakat Perumahan dengan Masyarakat Lokal di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta,”*

Penelitian ini membahas mengenai pola interaksi masyarakat yang berada di perumahan dan masyarakat lokal, dimana hasil penelitian tersebut adalah masing-masing diantara dua macam masyarakat tersebut mereka menggunakan interaksi timbal balik dan tercipta interaksi yang harmonis diantaranya.

Letak persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai pemberdayaan di Desa

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.” Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁰ Cahya Bintang Yulianto, *“Pola Interaksi Sosial antara masyarakat Perumahan dengan Masyarakat Lokal di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta,” Skripsi, Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015*

Panggunharjo, Sewon, Bantul. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada objek yang dikaji. Penulis memfokuskan objek kajiannya pada dinamika kepemimpinan kepala desa Panggunharjo dalam membangun partisipasi politik masyarakat masa bakti 2012-2017. Posisi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan mengenai bagaimana dinamika kepemimpinan kepala desa Panggunharjo masa bakti 2012-2017.

F. Landasan Teori

1. Kepemimpinan Kepala Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.¹¹ Di Indonesia, desa merupakan istilah resmi untuk satu bentuk pemukiman tertentu dan untuk pemerintahan otonom yang terkecil. Suatu desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih dari dan oleh warga desa yang mempunyai hak dipilih dan memilih.¹²

Kemudian mengenai *Scope* kepemimpinan kepala desa itu sendiri, Banyak teori mengenai penjabaran kepemimpinan, seperti Kartono

¹¹ M.Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press, 2007, hlm.338.

¹² Bahren Sugihen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

dalam bukunya yang menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³ Kemudian menurut Rivai, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁴ Nawawi juga menjelaskan dalam bukunya bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela.

Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan mengikutinya¹⁵ Sedangkan Pasolong juga mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik.¹⁶ Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama.

¹³ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 57.

¹⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 30.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2003), hlm. 21.

¹⁶ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal.....*, hlm. 4.

Kemudian dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Kepala Desa dijelaskan bahwa:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Undang-undang diatas kemudian diperkuat lagi dengan Permen No. 82 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Pengangkatan Kepala Desa dijelaskan bahwa:

- a. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- c. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- d. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut bisa dikatakan bahwa kepala desa merupakan pemimpin desa yang didampingi oleh para perangkat desa

guna melaksanakan tugas – tugas administrasi ditingkat desa di bawah camat.

2. Membangun Partisipasi Politik Masyarakat

Secara etimologi Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Bila digabungkan maka bisa diartikan dengan mengambil bagian. Dalam bahasa inggris, *Participate* atau *Participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu Negara.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁷ Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dalam masyarakat yang demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.¹⁸ Sedangkan tipologi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

¹⁷ Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 123.

¹⁸ Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.....*, hlm. 122.

Tipologi Partisipasi Politik Masyarakat¹⁹

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulative	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5.	Partisipasi fungsional	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung

¹⁹ Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33)

		pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7.	<i>Self mobilization</i>	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Dari pengertian partisipasi politik diatas maka Huntington dan Nelson memberikan batasan mengenai partisipasi politik yaitu:

- a. Partisipasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik bukan terpisah dari tindakan politik.
- b. Subjek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (*Private Citizen*) atau lebih tepatnya orang per-orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional dibidang politik seperti pejabat pemerintah, pejabat partai, calon politikus, lobbis profesional.

- c. Kegiatan partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.
- d. Mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal.
- e. Mencakup partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan, partisipasi otonom yaitu kegiatan politik yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah kegiatan politik yang dilakukan karena keinginan orang lain.

Sedangkan fungsi partisipasi politik tersebut sendiri adalah:

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, partisipasi politik masyarakat tersebut bisa dikategorikan dalam dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan bidang fisik dan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan bidang non-fisik.

- a. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan bidang fisik

Tidak mudah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun bidang fisik di tingkat desa. Pembangunan

memerlukan partisipasi rakyat aktif rakyat supaya berhasil.²⁰ Untuk itu dibutuhkan figur pemimpin dan manajemen kepemimpinan yang baik untuk mengkoordinir itu semua. Untuk itu mewujudkan hal tersebut paling tidak seorang kepala desa harus bisa memahami aspek dan pola gotong royong yang ada di daerahnya dan harus bisa mentaati regulasi administrasi yang ada didalamnya.

Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan di bidang fisik dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat bisa dikatakan berhasil jika didukung oleh dukungan partisipasi politik masyarakat dalam wujud tenaga. Senada dengan ini, Hamijoyo menegaskan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

b. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan bidang non-fisik

Pembangunan bidang non-fisik sangat identik dengan pembangunan mental, spiritual, religius, sosial, dan intelektual masyarakat. Dalam bahasa lain beberapa tokoh menyebutnya dengan partisipasi sosial, dimana partisipasi tersebut mengarah pada usaha memotivasi orang lain untuk melakukan partisipasi yang lebih baik di bidang social secara siap sedia dan tekun. Dimana *Goal* partisipasi tersebut adalah terciptanya masyarakat yang mempunyai

²⁰ Arief Budiman, *Kebebasan Negara, Pembangunan*, (jakarta: Pustaka Alfabeth, 2006), hlm. 25.

sikap, mental, spiritual, religius, sosial, dan intekektual yang baik dalam setiap diri masyarakat tersebut.

Mencermati berbagai penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali bentuk partisipasi politik masyarakat tersebut. secara mudah bisa diperhatikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Pakar	Teori Bentuk Partisipasi
Hamijoyo, ²¹ ; Holil, ²²	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
Hamijoyo, ²³ ; Pasaribu dan Simanjutak, ²⁴ ; Holil, ²⁵	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
Hamijoyo, ²⁶ ; Pasaribu dan Simanjutak, ²⁷	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
Hamijoyo, ²⁸ ; Pasaribu dan Simanjutak, ²⁹	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud

²¹ Hamijoyo, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 21.

²² Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1980), hlm. 81.

²³ Hamijoyo, *Pembangunan* ,,,, , hlm. 21.

²⁴ Pasaribu, L, B. *Simanjuntak, Sosiologi Pembangunan. Tarsito*, (Bandung: tt, 2005). Hlm. 11.

²⁵ Holil Soelaiman, *Partisipasi* ,,,, , hlm. 81.

²⁶ Hamijoyo, *Pembangunan* ,,,, , hlm. 21.

²⁷ Pasaribu, L, B. *Simanjuntak, Sosiologi* ,,,, , Hlm. 11.

²⁸ Hamijoyo, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 21.

²⁹ Pasaribu, L, B. *Simanjuntak, Sosiologi* ,,,, , Hlm. 11.

	agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Hamijoyo, ³⁰ ; Pasaribu dan Simanjutak, ³¹	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Hamijoyo, ³² ; Pasaribu & Simanjutak, ³³ ; Holil, ³⁴	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kepercayaan diri masyarakat, solidaritas dan integritas sosial masyarakat, tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat, kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri, prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat, kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat, organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.
Holil, ³⁵	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam

³⁰ Hamijoyo, *Pembangunan* ,,,, , hlm. 21.

³¹ Pasaribu, L. B. *Simanjutak, Sosiologi* ,,,, . Hlm. 11.

³² Hamijoyo, *Pembangunan* , hlm. 21.

³³ Pasaribu, L. B. *Simanjutak, Sosiologi* , Hlm. 11.

³⁴ Holil Soelaiman, *Partisipasi* , hlm. 9.

³⁵ Holil Soelaiman, *Partisipasi* , hlm. 9.

	rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
Holil, ³⁶	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

G. Definisi Konseptual

Konsep merupakan unsur dasar penelitian untuk menggambarkan konsep yang digunakan penulis untuk menyamakan persepsi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda. Untuk itu penulis memberikan definisi konseptual sebagai berikut.

1. Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak atau, dinamis serta dapat menyesuaikan diri secara baik dan memadai dalam setiap keadaan.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dan aktivitas seorang pemimpin untuk mengorganisir bawahannya untuk mewujudkan suatu tujuan bersama dengan efektif dan efisien.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang dipilih langsung oleh, dari dan untuk warga desa tersebut.

³⁶ Holil Soelaiman, *Partisipasi* , hlm. 81

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan arti dari variabel yang dimaksud merupakan suatu karakteristik tertentu yang bisa diukur dengan nilai atau ukuran. Terkait dengan penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif maka pengertian definisi operasional tersebut bukan berupa sesuatu yang bisa diukur dengan nilai atau ukuran namun lebih pada fungsi untuk membatasi pengertian dari konsep-konsep utama yang digunakan didalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala Desa
2. Membangun Partisipasi Politik Masyarakat
 - a. Partisipasi Uang
 - b. Partisipasi Harta Benda
 - c. Partisipasi Tenaga
 - d. Partisipasi Ketrampilan
 - e. Partisipasi Buah Pikiran
 - f. Partisipasi Sosial
 - g. Partisipasi Pengambilan Keputusan
 - h. Partisipasi Representatif

I. Metode Penelitian

Berdasar mempertimbangkan subjek yang dikaji maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic (*Naturalistic Research*), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*Natural Setting*). Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk mengkaji atau menguji suatu teori tertentu. Penelitian ini lebih berorientasi mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang di peroleh dengan berbagai sumber yang terpercaya.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif analitis studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan secara fenomena yang diselidiki.³⁷

Dengan demikian penulis mencermati seluruh dinamika yang terjadi pada subjek tempat penelitian yang dilihat sebagai studi kasus untuk dianalisa lebih lanjut.

2. Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan data yang sesuai maka harus menentukan subjek penelitian itu sendiri. dikarenakan penelitian ini membahas

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

mengenai dinamika kepemimpinan kepala desa maka subjeknya juga harus yang bisa memberikan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diangkat penulis.

Secara garis besar subjek penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu informasi kunci (*Key Informan*) dan informan pendukung. Informan kunci pada penelitian ini adalah kepala desa Panggungharjo yaitu bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, perangkat desa Panggungharjo ibu Yuli Trisniati S.H, dan penduduk desa Panggungharjo saudara Agung Prayogi.

Sedangkan informan pendukungnya adalah pihak-pihak yang sekiranya ikut berperan secara tidak langsung, seperti masyarakat sekitar desa Panggungharjo dan lain sebagainya. Berikut beberapa subjek penelitian dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat

dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dan perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi selama masa kepemimpinan kepala desa Panggunharjo masa bakti 2012-2017.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁸ Wawancara yang dilakukan termasuk jenis wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka karena pertanyaan memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka.³⁹ Wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁰

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana dinamika yang terjadi selama masa kepemimpinan kepala desa Panggunharjo masa bakti 2012-2017.

c. Dokumentasi

³⁸ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 57.

³⁹Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan.....*, hlm. 58.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 197.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, raport, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti⁴¹. Dokumen yang dipakai termasuk dokumen resmi karena merupakan bahan tertulis, surat-surat dan catatan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah badan-badan kemasyarakatan atau organisasi sosial politik.⁴²

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum desa Panggungharjo seperti letak dan keadaan geografis, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan desa, dan segala catatan arsip yang berhubungan dengan desa tempat penelitian.

J. Analisis Data

1. Pendekatan

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang di angkat penulis merupakan masalah yang erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi di masyarakat desa.

⁴¹ Rusdin Pohan, *Metodologi*, hlm. 74.

⁴²Rusdin Pohan, *Metodologi*, hlm. 75.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman yang meliputi:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.⁴³

b. Penyajian data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁴

c. Verification

Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁵

2. Metode Berpikir

Metode berpikir induktif terkait dengan jenis penelitian kualitatif. Metode berpikir induktif karena dapat menganalisis data dari fakta yang bersifat khusus ke arah fakta yang bersifat umum.

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke fakta-fakta yang bersifat umum.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 338.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan.....*, hlm. 341.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan.....*, hlm. 345.

Selain itu juga menggunakan teknik *Triangulasi data*, yaitu penggabungan metode.⁴⁶ Dalam hal ini penggabungan antara wawancara dengan dokumentasi. Data hasil wawancara akan dibandingkan dengan kesesuaian data dokumentasi.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bab I sampai III sebagai yang di jelaskan di bawah ini. Kemudian di tutup dengan Bab IV sebagai penutup.

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Landasan Teori
- G. Deskripsi Konseptual
- H. Deskripsi Operasional
- I. Metode Penelitian
- J. Analisis Data

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 249.

K. Sistematika Pembahasan

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA PANGGUNG HARJO

- A. Letak Geografis
- B. Desa Panggungharjo
- C. Kondisi Masyarakat Desa Panggungharjo

BAB III: ANALISA DINAMIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA

- A. Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa Panggungharjo Masa Bakti 2012-2017
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Panggungharjo Masa Bakti 2012-2017

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PROFIL PENULIS